

Identifikasi Program *Corporate Social Responsibility* Di Pangkalan Brandan terhadap Rencana Pendirian Pabrik Sodium Ligno Sulfanat

Subhan Afifi

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta

Email : subhanafifi@yahoo.com

Abstract

According to the Law No 40, 2007 stated that each of companies must be responsible to society and environment where the companies occupied. These duties involved the companies's commitment to do an economics and environment development for society. In line to Pertamina's plan to build a new factory for Sodium Ligno Sulfanat production, it is necessary for companies to recognize the society's problems from ranging of social, cultural, economics, and religion. Therefore, it is an important thing to know the society perceptual toward this plan. How do people in Pangkalan Brandan perceive to Pertamina's plan to build new factory to produce the Sodium Ligno Sulfanat. By qualitative approach, data was gathered through interviews and focus group discussion. The results showed us that CSR (community social responsibility) programs were identified that must be executed in accordance with the Pertamina's plan to build new factory in Pangkalan Brandan. First, people wish that new factory can increase the prosperity for society. Second, this factory can decrease an unemployment rate for society. Third, this factory will not conceal the environment or damage the environment. Fourth, this factory can support the social concerns in the society. Therefore, CSR programs will be organized in line to the identifications were obtained.

Keywords: *CSR Programs, new factory, a company's commitment, Pangkalan Brandan, Pertamina*

Abstrak

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan itu berada. Kewajiban ini mencakup pembangunan ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Berkenaan dengan rencana Pertamina mendirikan pabrik baru di Pangkalan Brandan untuk memproduksi *Sodium Ligno Sulfanat*, perlu perusahaan mengenali permasalahan-permasalahan dalam masyarakat dari persoalan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Oleh karena itu menjadi hal penting untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap rencana tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan focus group discussion. Hasilnya menunjukkan bahwa pertama, pabrik itu dapat meningkatkan kesejahteraan. Kedua, dapat mengurangi angka pengangguran. Ketiga, tidak merusak lingkungan. Keeempat, pabrik ini dapat mendukung kegiatan sosial masyarakat. Program CSR akan dilakukan berdasarkan identifikasi yang telah diperoleh ini.

Kata kunci: Program CSR, komitmen perusahaan, Pangkalan Brandan

Pendahuluan

Pangkalan Brandan adalah sebuah kota kecil di daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kota ini pernah dikenal sebagai kota minyak, karena di tempat inilah ditemukan salah satu ladang minyak tertua di Indonesia. Eksplorasi minyak di daerah ini bahkan telah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda. Kota yang terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatera, sekitar 60 km di sebelah utara Kota Binjai ini termasuk daerah strategis karena dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera dan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sejarah penting kota ini sudah bisa dirunut sejak tahun 1883 ketika Konsesi pertama eksploitasi minyak bumi diberikan oleh Sultan Langkat kepada Aeilko J. Zijlker, tepatnya di daerah Telagasaid. Kemudian pada tahun 1885 dilakukan produksi pertama minyak bumi dari perut bumi Pangkalan Brandan, dan pada tahun 1892 kilang minyak *Royal Dutch* yang menjalankan usaha eksplotasi mulai melakukan produksi massal.

Eksplotasi minyak menjadi kegiatan primadona bagi berbagai pihak di Pangkalan Brandan sejak zaman Belanda tersebut. Di zaman kemerdekaan, kegiatan ini terus berlangsung. Kota ini juga pernah dikenal dalam sejarah perjuangan kemerdekaan ketika pada tanggal 13 Agustus 1947 terjadi peristiwa *Brandan Bumi Hangus* yang dilakukan para pejuang sebagai salah satu strategi pejuang sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi Belanda. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Brandan).

Masyarakat Pangkalan Brandan pernah merasakan kejayaan industri perminyakan ketika Pertamina memiliki daerah produksi di kota ini. Ekonomi masyarakat terutama digerakkan oleh industri ini. Para pekerja dari berbagai daerah juga berdatangan ke Pangkalan Brandan karena daya tarik ekonomi dari industri perminyakan. Sayangnya pesona kota ini memudar seiring dengan habisnya minyak yang bisa dieksplorasi. Saat ini, gedung Pertamina Pangkalan Brandan masih tegak berdiri menjadi saksi pernah

berjayanya industri perminyakan.

Dalam perkembangan terkini, Pertamina berusaha menghidupkan kembali industrinya di Pangkalan Brandan. Salah satunya adalah dengan mencoba merancang pabrik baru di lokasi kilang minyak Pangkalan Brandan, yaitu Pabrik Surfaktan. Menarik untuk dicermati bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan dan budaya, serta persepsi dan harapan masyarakat terkait rencana pembangunan pabrik Surfaktan SLS ini, terutama jika dikaitkan dengan Program *Corporate Social Responsibility* yang wajib dilakukan oleh perusahaan.

SLS adalah *Sodium-Ligno-Sulfonat* yang merupakan salah satu jenis surfaktan (*Surface Active Agent*) untuk EOR (*Enhanced Oil Recovery*), sebagai salah satu proses produksi dalam industri perminyakan. SLS dapat menurunkan tegangan antarmuka dua fasa cair sehingga dapat meningkatkan perolehan minyak dari sumur minyak. SLS merupakan senyawa kimia hasil reaksi dari *Natrium Bisulfit* dan *Lignin*. Lignin diperoleh dari limbah kelapa sawit (tandan kosong sawit) yang melimpah di daerah Pangkalan Brandan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana persepsi dan harapan masyarakat tentang Program *Corporate Social Responsibility* dari pabrik Surfaktan SLS di Pangkalan Brandan ? Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur sosial dan budaya masyarakat Pangkalan Brandan dalam berbagai aspeknya, serta mengetahui persepsi dan harapan masyarakat jika pabrik Surfaktan SLS benar-benar didirikan. Studi ini merupakan bagian dari Studi kelayakan pabrik Surfaktan SLS yang bersifat komprehensif, baik yang bersifat teknis, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Pengembangan masyarakat dimulai dari bawah dengan mempertimbangkan aspek: menghargai pengetahuan lokal, menghargai kebudayaan lokal, menghargai sumber daya lokal, menghargai keterampilan lokal dan menghargai proses lokal (Ife & Tesoriero, 2008:242). Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya memiliki 4 komponen

yaitu : melestarikan dan menghargai budaya lokal, melestarikan dan menghargai budaya asli/pribumi, multikulturalisme, dan budaya partisipatori (Ife & Tesoriero, 2008:447).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menghendaki adanya hubungan harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar yang disebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai usaha menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup (Alfitri, 2011:8)

Potensi konflik antara masyarakat dan korporasi merupakan persoalan yang banyak dihadapi dan perluantisipasi. Konflik yang muncul dapat berdimensi ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dimensi ekonomi lebih banyak disebabkan oleh kemiskinan dan ketimpangan wilayah operasi industri. Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan menjadi implikasi yang perlu diperhatikan.

Dimensi sosial budaya menyangkut perubahan tata nilai sosial dan kebudayaan yang dikhawatirkan terjadi karena munculnya pendatang dan budaya baru yang dibawa oleh industri. Menghilangkan segregasi melalui upaya pembaruan, penataan pemukiman, penyediaan fasilitas dan kegiatan publik yang menyatukan batasan sosial yang berkaitan dengan korporasi menjadi implikasi yang perlu diperhatikan. Sedangkan dari aspek politik, biasanya konflik muncul karena transisi politik, kontestasi kekuasaan, melemahnya otoritas public terhadap komunitas (Dody Prayogo, 2004 dalam Alfitri, 2011: 18-19).

Secara umum sumber konflik dalam relasi masyarakat-korporasi disebabkan oleh pembangunan yang mengabaikan keberadaan dan peran masyarakat lokal. Untuk itu konsep pemberdayaan masyarakat menjadi

agenda sebagai solusi. Jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka "3P" harus dikelola secara seimbang, yaitu: profit yang dikejar, harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi aktif menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Teori ini dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line* dan dikembangkan oleh John Elkington (dalam Widjaja dan Pratama, 2008: 33)

Perusahaan penting untuk memahami masyarakat dan komunitas yang menjadi konstituennya, dengan cara memahami masalah mereka, apa yang penting untuk mereka, dan apa yang mereka pikirkan tentang perusahaan. Setelah itu perusahaan membuat program pemberdayaan dan mengkomunikasikannya pada masyarakat. Hal ini menjadi konsep dasar tentang *Corporate Philanthropy and Social Responsibility* yang menjadi komponen penting dari reputasi (Argenti, 2003: 75-76).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) menjadi amanah UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 UU tersebut jelas menyebutkan : (1) Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang tersebut, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didefinisikan sebagai berikut: "Komitmen perseoran untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) peran sosialnya dijalankan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang bersangkutan melalui pemanfaatan dana dari sumber yang sama.

Berdasarkan kajian Nursahid (2006:165) pada umumnya *stakeholders* memiliki persepsi yang positif terhadap perusahaan terkait program PKBL BUMN. Ada sejumlah pandangan kritis misalnya menyangkut perlunya pemihakkan secara jelas oleh perusahaan terhadap kelompok marjinal, keberlanjutan pembinaan pasca bantuan, terutama menyangkut program peningkatan SDM masyarakat setempat. Seringkali perusahaan memberikan bantuan begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas.

Studi kelayakan pendirian sebuah pabrik baru sangat penting untuk menyertakan kajian bidang sosial budaya, di samping bidang teknis dan ekonomis. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang aspek sosial budaya dalam studi kelayakan pabrik biasanya diperlukan beberapa data berikut ini :

Data kependudukan masyarakat sekitar lokasi, termasuk data sosial budaya dan struktur masyarakat. Apakah pabrik akan menimbulkan efek negatif terhadap pola komunikasi dan stuktur budaya yang dianggap mapan selama ini. Pola-pola hidup (gaya hidup) yang bagaimana yang diperkirakan akan berubah jika dibangun pabrik di sekitar tempat tinggal mereka.

Data tentang potensi *lokal skill* penduduk sekitar.

a. Data tentang kondisi keamanan (tingkat kriminalitas dan potensi ancaman keamanan)

b. Data tentang persepsi masyarakat : Apakah budaya masyarakat sekitar memberikan dukungan positif terhadap rencana pembangunan pabrik, Apakah struktur kependudukan termasuk

struktur sosial, budaya, agama memberikan potensi dukungan pada pembangunan pabrik, apakah kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan pabrik cukup memadai.

c. Data tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menggambarkan kebutuhan kesejahteraan dan permasalahan utama yang dihadapi.

d. Data tentang program CSR perusahaan yang pernah ada, persepsi masyarakat terhadap program CSR tersebut dan harapan untuk pengembangan program CSR oleh perusahaan baru di masa mendatang.

Berdasarkan data kajian aspek sosial budaya tersebut, diharapkan dapat tersusun *deliverables* seperti: kondisi keamanan, peta kondisidampaksosialbudayaakibatpembangunan pabrik baru, peta resiko sosial dan rencana mitigasi resiko sosial proyek, serta Program kerja CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diharapkan dapat dilaksanakan jika pabrik tersebut benar-benar berdiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, berupa : wawancara mendalam, *focus group discussion* dan observasi. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan informasi secara komprehensif mengenai struktur sosial budaya dan persepsi masyarakat terkait rencana pembangunan pabrik Surfaktan SLS.

Hasil kajian dalam aspek sosial-budaya diharapkan memberikan *deliverables* yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan dan akan ditindaklanjuti dalam implementasi pembangunan pabrik Surfaktan SLS yang diharapkan tidak menimbulkan berbagai macam kendala/ permasalahan sosial dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Wilayah Pangkalan Brandan

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara.

Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"- 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km² atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km² atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. Secara Administratif pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2012 terdiri dari 23 Kecamatan, 240 Desa dan 37 Kelurahan.

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 967.535 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 154,48 jiwa per Km². Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2000 adalah sebesar 0,88 persen per tahun. Untuk tahun 2012 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat 976.885 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 83.114 jiwa dengan kepadatan penduduk 763,56 jiwa per Km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pematang Jaya sebesar 13.106 jiwa.

Kecamatan Binjai merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.020,00 jiwa per Km² dan Kecamatan Bahorok merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 36,50 jiwa per Km². Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin lebih banyak laki-laki

dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk laki-laki sebesar 492.424 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 484.461 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,64 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sebanyak 2.464 orang, yang terdiri dari 821 tenaga kerja laki-laki dan 1.643 perempuan. Pencari kerja yang terdaftar tersebut paling banyak mempunyai tingkat pendidikan tamat SLTA umum/kejuruan/lainnya yaitu 1.434 orang atau 58,20 persen, sedangkan Sarjana Lengkap 171 orang atau 6,94 persen, SLTP umum/ sederajat 441 orang atau 17,90 persen dan sisanya tamat DI/DII/DIII 265 orang atau 10,75 persen, dan tamat SD 153 orang atau 6,21 persen.

Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Pangkalan Brandan

Pangkalan Brandan merupakan ibukota dari 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei Lapan, dan Kecamatan Brandan Barat. Pertamina Pangkalan Brandan yang menjadi lokasi pabrik SLS berada di Kecamatan Sei Lapan, dan berdekatan dengan Kecamatan Babalan dan Brandan Barat.

Dari sisi struktur sosial, masyarakat Pangkalan Brandan terbagi menjadi 3 bagian besar: Masyarakat Kota, Masyarakat Petani, dan Masyarakat Nelayan. Masyarakat kota bertempat tinggal di pusat kota Pangkalan Brandan, dan bermatapencarian sebagai pegawai, pedagang, dan berbagai jenis pekerjaan di sektor informal. Salah satu jenis pekerjaan yang cukup banyak terlihat di pusat kota Pangkalan Brandan, adalah pengemudi Becak Motor (Bentor). Becak Motor adalah alat transportasi unik yang memodifikasi becak dan kendaraan bermotor roda dua. Dari sisi budaya, Masyarakat Kota memiliki karakteristik yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru, termasuk terhadap berbagai rencana pembangunan.

Masyarakat Petani bertempat tinggal di kawasan perkebunan sawit yang terletak di pinggiran Pangkalan Brandan. Mereka bekerja

sebagai buruh penggarap perkebunan kelapa sawit, atau menjadi pemilik dari tanah-tanah perkebunan tersebut. Masyarakat Nelayan bertempat tinggal di pulau-pulau kecil di pinggir laut lepas yang masih masuk dalam wilayah Pangkalan Brandan, terutama daerah Kecamatan Brandan Barat. Dari sisi kesejahteraan, masyarakat nelayan relatif berada di bawah masyarakat Kota dan Masyarakat Nelayan. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan pencari ikan di laut lepas, dan sebagian yang lain mencari penghasilan dengan menjadi Tukang Sampan Dayun yang melayani transportasi masyarakat dari kampung Nelayan ke Kota Pangkalan Brandan. Masyarakat Nelayan ini juga dikenal memiliki karakter yang keras, dan kritis terhadap berbagai rencana pembangunan.

Mereka merupakan kelompok masyarakat yang sangat peka dan sensitif terhadap pembangunan ketika menyangkut

pendirian pabrik. Tampaknya pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki sudah terlanjur menilai bahwa usaha mendirikan pabrik atau pembangunan lainnya seringkali merugikan kepentingan mereka. Kecamatan Sei Lapan yang menjadi lokasi pendirian pabrik SLS memiliki luas wilayah 280,68 Km², dan menjadi kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Pangkalan Brandan, yakni 47.231 jiwa. Kecamatan Babalan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 56.935 jiwa. Data selengkapnya tentang luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk di Pangkalan Brandan, dapat dicermati pada tabel di bawah ini :

Dari sisi jenis kelamin, penduduk Pangkalan Brandan di 3 kecamatan, menunjukkan perbandingan yang hampir seimbang, yaitu laki-laki: 64.458 (51,04%) dan perempuan 61.834 (48,96%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.17 berikut ini :

Tabel 1.
Wilayah, Jumlah Desa dan Penduduk di Pangkalan Brandan

Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
Babalan	76.41	8	56935
Sei Lapan	280.68	14	47231
Brandan Barat	89.8	7	22126
Jumlah	446.89	29	126292

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2013 diolah

Kecamatan Babalan memiliki jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayah terkecil di Pangkalan Brandan memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 745,12 jiwa / km²

dengan rerata penduduk per desa sebanyak: 7.166,88. Data perbandingan 3 kecamatan dapat dicermati pada tabel berikut ini :

Tabel 2.
Penduduk dan Rerata Penduduk Per Desa di Pangkalan Brandan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rerata Penduduk Per Desa
Babalan	745.12	7166.88
Sei Lapan	168.27	3373.64
Brandan Barat	246.39	3160.86
Jumlah	1159.78	13701.38

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2013 diolah

Kesejahteraan penduduk di Pangkalan Brandan tercermin dari jumlah keluarga berkategori Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera

II, Sejahtera III dan Sejahtera Plus. Jumlah total keluarga Pra Sejahtera di 3 kecamatan ini masih cukup tinggi, yaitu sebesar 4.305 keluarga

Tabel 3
Perbandingan Jenis Kelamin Penduduk di Pangkalan Brandan

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Babalan	29011	27924	56935
Sei Lapan	24077	23154	47231
Brandan Barat	11370	10756	22126
Jumlah	64458	61834	126292

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2013 diolah

(11,89%). Walaupun jumlah tersebut masih lebih rendah dari Jumlah keluarga Sejahtera I (8.529 keluarga atau 23,55%), Keluarga Sejahtera II (12.801 atau 35,35 %), Keluarga Sejahtera III (9.738 keluarga atau 26,89 %), tetap saja persoalan kesejahteraan menjadi agenda utama pemerintah di Pangkalan Brandan. Jumlah keluarga yang berkategori Sejahtera Plus hanya 836 keluarga (2,31%), bahkan di Kecamatan Brandan Barat yang wilayahnya banyak mencakup perkampungan nelayan, tidak ditemukan keluarga berkategori Sejahtera Plus. Data selengkapnya dapat diamati pada tabel 4.

Masyarakat Pangkalan Brandan dikenal

sebagai masyarakat yang religius. Penduduknya mayoritas beragama Islam (91,30%). Mereka hidup rukun dan damai dengan penganut agama lain, yaitu Katolik (0,44%), Kristen Protestan (6,68%), Hindu (0,01 %), Budha (1,11 %), dan Konghuchu (0,01%). Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.

Dari sisi budaya, kebudayaan masyarakat Pangkalan Brandan dipengaruhi oleh budaya Melayu. Etnis yang dominan adalah etnis Melayu. Etnis-etnis yang lain juga dapat ditemui, diantaranya adalah: Jawa, Batak, Minang, Banjar, Aceh, Ambon, Sunda, Betawi,

Tabel 4.
Kesejahteraan Penduduk di Pangkalan Brandan

Kecamatan	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera Plus	Total
Babalan	1698	3784	4588	4243	720	15033
Sei Lapan	1549	2809	6407	3094	116	13975
Brandan Barat	1058	1936	1806	2401	0	7201
Jumlah	4305	8529	12801	9738	836	36209

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2013 diolah

Tabel 5.
Agama di Pangkalan Brandan

Kecamatan	Agama								Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghuchu	Lainnya	Tidak merespon	
Babalan	48,816	286	6,082	15	1,004	6	0	247	56,456
Sei Lapan	43,913	254	1,969	0	372	0	0	302	46,810
Brandan Barat	21,560	14	309	0	18	0	0	4	21,905
Jumlah	114,289	554	8,360	15	1,394	6	0	553	125,171

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2013 diolah

Nias dan China. Berbagai ragam kesenian dan kebudayaan Melayu dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat. Hal ini, diantaranya dikembangkan melalui keberadaan sanggar-sanggar seni dan budaya Melayu, sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan tersebut

Pendidikan di Pangkalan Brandan dapat dicermati dari ketersediaan sekolah mulai tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Keterlibatan masyarakat dalam usaha ikut memajukan pendidikan terlihat dari banyaknya sekolah swasta yang didirikan untuk melengkapi sekolah negeri yang jumlahnya masih terbatas.

Dari 3 kecamatan di Pangkalan Brandan, Kecamatan Brandan Barat merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah sekolahnya. Tidak ditemukan TK, hanya ada 12 SD, 2 SMP, 1 SMA, dan tidak ada SMK. Wilayah Brandan Barat yang sebagiannya adalah kampung nelayan, memang tertinggal dalam hal pendidikan di banding 2 kecamatan yang lain. Tabel 6 adalah data jumlah sekolah di Pangkalan Brandan.

Data jumlah sekolah pada tabel tersebut dilengkapi dengan data pada tabel di bawah ini yang memberikangambarantentangperbandingan

jumlah guru dan murid di Pangkalan Brandan. Perbandingan jumlah sekolah, guru dan murid dari masing-masing wilayah mencerminkan tingkat perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Di semua jenjang Kecamatan Bebalan menempati jumlah yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan kemajuan dalam suatu masyarakatnya.

Dinamika masyarakat di Pangkalan Brandan tidak bisa terlepas dari peran para pemuka pendapat (*opinion leader*) yang menjadi referensi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Para pemuka pendapat itu terdiri dari para pemimpin formal pemerintahan, mulai dari Camat-Lurah/Kepala Desa, Kepala Kampung, RW-RT, dan para pemimpin informal, seperti tokoh agama, tokoh Partai Politik, dan Tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas).

Fenomena lain yang ditemukan di Pangkalan Brandan adalah banyak ditemukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan eksisnya media lokal dengan para wartawannya. Berbagai jenis LSM menjalankan perannya sebagai kelompok penekan (*pressure group*)

Tabel 6.
Jumlah Sekolah di Pangkalan Brandan

Kecamatan	Jumlah TK			Jumlah SD			Jumlah SMP			Jumlah SMA			Jumlah SMK		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
Babalan	1	5	6	25	6	31	2	11	13	1	4	5	0	7	7
Sei Lapan	0	3	3	15	5	20	4	4	8	1	3	4	0	0	0
Brandan Barat	0	0	0	12	0	12	1	1	2	1	0	1	0	0	0
Jumlah	1	8	9	52	11	63	7	16	23	3	7	10	0	7	7

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2013 diolah

Tabel 7
Perbandingan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Pangkalan Brandan

Kecamatan	TK			SD			SMP			SMA			SMK		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
Babalan	6	39	315	31	439	7,726	13	243	3,380	5	84	1,132	7	193	2,500
Sei Lapan	3	9	155	20	278	4,965	8	118	1,163	4	37	1,189	0	0	0
Brandan Barat	0	0	0	12	143	2,274	2	44	561	1	91	236	0	0	0
Jumlah	9	48	470	63	860	14,965	23	405	5,104	10	212	2,557	7	193	2,500

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2013 diolah

yang sering bersikap kritis terhadap berbagai persoalan pembangunan di Pangkalan Brandan. Di tingkat Kabupaten Langkat, tercatat banyak sekali LSM dan organisasi masyarakat, dengan berbagai nama organisasi.

Kondisi Keamanan Pangkalan Brandan

Keamanan di wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Pangkalan Brandan, relatif aman. Menurut Kepala Seksi Umum (Kasium) Polsek Pangkalan Brandan, Aiptu Fachruddin R, secara umum situasi keamanan, ketertiban masyarakat di wilayah ini tergolong kondusif. Tindak kejahatan yang terjadi tergolong konvensional seperti pencurian dan lain-lain.

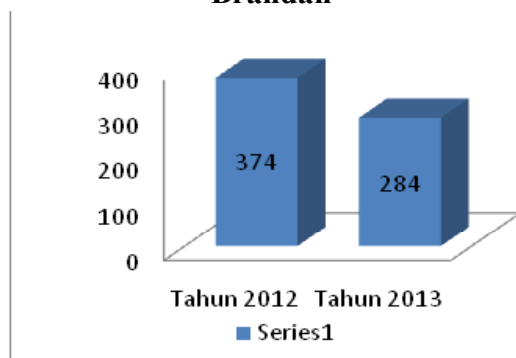
Gangguan keamanan yang berhubungan dengan konflik horizontal relatif tidak terjadi. Konflik agama, suku bangsa/etnis tidak pernah terjadi. Tindak kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan ganja mulai banyak ditemukan. Berdasarkan data dari Polsek Pangkalan Brandan, tercatat angka kejahatan di tahun 2013 berjumlah 284 tindak pidana, menurun dibanding tahun 2012 sebanyak 374 tindak pidana, seperti tersaji dalam diagram berikut ini :

Gambaran jenis kejahatan yang terjadi pada triwulan terakhir tahun 2013, didominasi oleh penganiayaan dan pencurian dengan pemberatan. Datanya dapat dicermati dalam diagram 2 berikut ini :

Data tentang tindak pidana tersebut dapat

Diagram 1.

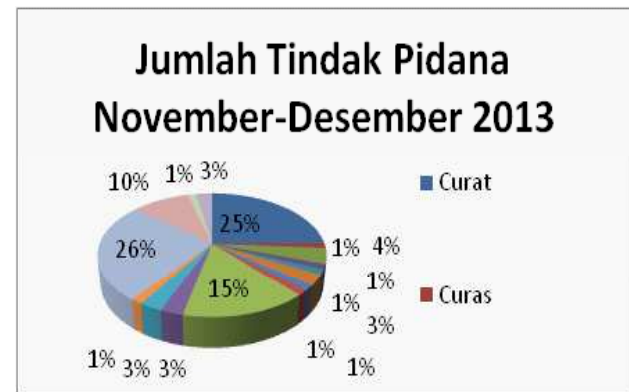
Jumlah Tindak Pidana di Pangkalan Brandan



Sumber : Polsek Pangkalan Brandan, 2014

dibandingkan dengan jumlah tindak pidana secara keseluruhan di Kabupaten Langkat, seperti yang tersaji dalam tabel 8.

Berdasarkan penjelasan narasumber dari Polsek Pangkalan Brandan dan data-data Diagram 2.



kuantitatif yang mendukung, dapat disimpulkan bahwa kondisi keamanan di Pangkalan Brandan kondusif untuk pendirian pabrik SLS.

Tanggapan Masyarakat tentang Rencana Pendirian Pabrik SLS

Untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang rencana pendirian pabrik SLS di Pangkalan Brandan, dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemimpin formal, tokoh masyarakat dan warga masyarakat di Pangkalan Brandan. Mereka yang diwawancarai dan berpartisipasi dalam kegiatan FGD adalah : Aiptu Fachruddin R, (Kasium Polsek Pangkalan Brandan), Drs Wagito S (Camat Sei Lapan), Siti Jusnah S.Sos (Kepala Desa Alur 2), Abdul Wahab (Kepala Desa Puraka 1), Syafrizal (Kepala Desa Kelantan-Brandan Barat), Junaidi (Kepala Desa Perlis-Brandan Barat), Ishak, Rusli, Nasir, Nazarudin, Syamsudin Lubis, dan M.Amin (tokoh dan warga masyarakat).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan FGD yang dilakukan, para narasumber menyatakan sangat setuju dengan rencana pendirian pabrik SLS di lokasi Pertamina Pangkalan Brandan. Mereka merasa terkesan dengan kejayaan Pangkalan Brandan di masa lalu yang ikut memberikan pengaruh pada

Tabel 8
Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Langkat

Jenis Kejahatan	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Pembakaran	6	5	15	6
Kebakaran	6	13	15	8
Pemalsuan Materai, Merk, Surat	12	11	11	9
Melanggar Kesopanan	57	69	69	64
Pemeriksaan	8	14	11	3
Perjudian	100	201	219	185
Penganiayaan Berat	325	343	350	321
Penganiayaan Ringan	30	39	31	31
Pencurian Ringan	110	170	163	161
Pencurian dengan Kekerasan	61	79	67	33
Pemerasan	16	19	16	8
Penggelapan	147	176	130	107
Penipuan	56	120	89	77
Merusak Barang Orang Lain	35	59	53	59
Penadahan	0	0	0	2
Pembunuhan	10	9	12	3
Narkotika	134	121	91	105
Pencurian Kendaraan Bermotor	134	122	190	100
Penculikan	0	3	0	0
Penghinaan	61	90	71	26
Penyeludupan	3	4	2	0
Lain-lain	684	839	764	588
Total	1995	2506	2369	1896

Sumber : Polsek Pangkalan Brandan, 2014

kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Pangkalan Brandan bahkan memiliki kecintaan dan rasa ikut memiliki Pertamina yang merupakan kilang minyak pertama di Indonesia, dan merupakan bagian dari sejarah perminyakan di Indonesia.

Rasa cinta dan ikut memiliki itu salah satunya terlihat dari demonstrasi yang dilakukan warga Pangkalan Brandan pada hari Senin, 19 November 2012. Demonstrasi di Pertamina Pangkalan Brandan itu dilakukan untuk menentang rencana penjualan aset milik Pertamina. Terhentinya operasional kilang Pangkalan Brandan karena tidak adanya suplai minyak mentah dari sumur-sumur minyak yang sudah mengering karena eksploitasi bertahun-tahun, termasuk sumur minyak pertama yang ditemukan di Indonesia, Telaga Said. Warga masyarakat menilai, Pertamina Pangkalan Brandan memiliki nilai sejarah sehingga mereka menolak jika aset bersejarah tersebut harus dilepas.

Menurut Siti Jusnah, Zuhriah, Kepala Desa Alur 2, masyarakat mendukung rencana pendirian pabrik SLS di lokasi Pertamina Pangkalan Brandan, tetapi dengan beberapa

catatan. Berikut ini pendapat Siti Jusnah :

Kami mendukung asalkan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ada kontribusinya kelak untuk desa sekitarnya. Kalau kami minta bantuan apa, ya bisa dibantu. Selain itu, kalau bisa tenaga kerja lokal juga dimanfaatkan. Memang di sini aman, tetapi yang sering diributkan kalau ada perusahaan yang masuk adalah masalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu yang diributkan warga. "Tolong lah Bu masukkan saya," begitu kata warga. Seringkali perusahaan yang ada disini tenaga kerjanya banyak dari luar. Ini yang memunculkan kecemburuan sosial. Warga kami banyak yang sarjana. Bisa dimanfaatkan. (Sumber : Wawancara, 21 Januari 2014)

Apa yang diungkapkan Siti Jusnah, menjadi pendapat umum para pemimpin pemerintahan tingkat kecamatan dan desa di Pangkalan Brandan. Wagito S (Camat Sei Lapan), Abdul Wahab (Kepala Desa Puraka 1), Syafrizal (Kepala Desa Kelantan-Brandan Barat), dan Junaidi (Kepala Desa Perlis-Brandan

Barat), memiliki pendapat yang hampir sama. Mereka mendukung rencana pendirian pabrik SLS, asalkan memberikan kontribusi pada masyarakat Pangkalan Brandan, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja.

“Kami berharap, walaupun hanya tenaga kerja rendahan yang tidak butuh *skill* tinggi, bisa diambil dari warga kami,” ujar Wagito S. “Pabrik ini sebaiknya memberikan kontribusi bagi desa terdekat, seperti desa kami,” kata Abdul Wahab. “Selama ini, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini, tidak begitu memberi perhatian pada desa kami, terutama daerah kampung nelayan,” tegas Junaidi. “Seharusnya, desa kami dapat kompensasi dari kehadiran industri di daerah ini, tetapi kami hanya kebagian dampak lingkungannya saja,” tambah Syfrizal yang ditemui dalam kesempatan terpisah.

Persoalan dampak lingkungan juga menjadi perhatian tokoh masyarakat dan warga dalam Forum Diskusi Terfokus. Pada dasarnya mereka sepakat dengan rencana pendirian pabrik SLS, tetapi mereka mengkhawatirkan munculnya dampak lingkungan seperti : pencemaran air sungai dan laut, munculnya bau tak sedap, atau pencemaran udara. Berikut ini pendapat Nazarudin, salah seorang tokoh masyarakat Desa Perlis, Brandan Barat :

Industri memang membuka lapangan kerja, tetapi jangan sampai limbah mengalir ke sungai kami, atau bahkan merusak biota laut kami, ini yang jadi perhatian kami. Pabrik Kelapa Sawit selama ini ada yang membuat limbah cairan ke laut, ini merusak lingkungan. Selama ini limbah cairan kelapa sawit bau, airnya warna merah. Belum lagi pencemaran udara berupa asap. Limbah harus dikelola dengan baik, jangan sampai dibuang ke sungai dan laut, ikan-ikan akan mati. Ini yang kami khawatirkan. Jangan sampai kehadiran industri merusak laut kami : Teluk Aru. (Sumber : Focus Group Discussion Desa Perlis, 21 Januari 2014)

Masalah lingkungan menjadi keprihatinan

masyarakat, seiring dengan banyaknya industri di kawasan Pangkalan Brandan. Fenomena penebangan liar, perusakan hutan mangrove, pencemaran air sungai dan laut, dan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak oleh industri perikanan besar, dirasakan dampak buruknya oleh masyarakat. Khusus untuk masalah penggunaan alat tangkap ikan yang merusak pernah berujung bentrok fisik yang melibatkan nelayan tradisional dan industri perikanan. Untuk itu tokoh masyarakat berharap, kehadiran pabrik SLS tidak ikut merusak lingkungan, bahkan diharapkan kontribusinya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan melalui program-program pelestarian.

Selain masalah lingkungan, kontribusi industri untuk masyarakat yang diharapkan terkait dengan masalah pendidikan. Peningkatan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kualitas pembelajaran sangat diharapkan masyarakat Pangkalan Brandan, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Di Desa Perlis dan Kelantan, Pangkalan Brandan, yang dikenal sebagai kampung nelayan misalnya, kondisi sekolah yang ada sangat memprihatinkan. Anak sekolah harus menyeberang sungai menggunakan sampan dayung dan menempuh jarak yang cukup jauh ke Kota Pangkalan Brandan untuk sekolah.

Untuk itu mereka berharap di desa mereka ada sekolah berkualitas, sehingga anak-anak mereka tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk sekolah. Penduduk Desa Perlis berharap ada sekolah setingkat SMP di desa mereka, sedangkan penduduk Desa berharap ada SD Negeri. Industri yang ada, diharapkan ikut memikirkan masalah peningkatan pendidikan melalui program peduli pendidikan, baik yang terkait dengan infrastruktur maupun pengembangan kualitas SDM dan pembelajaran di sekolah.

Di sisi lain, Syamsudin Lubis dan M.Amin, Imam dan Ta'mir Masjid Ubudiyah, Pangkalan Brandan menyatakan setuju dengan rencana pendirian pabrik SLS, karena akan membuka lapangan kerja bagi anak muda yang banyak menganggur. Mereka berharap

industri lebih memperhatikan masyarakat dengan ikut membina masyarakat terutama para pemudanya. Masih tingginya angka pengangguran, menyebabkan para pemuda banyak yang terseret pergaulan dan perilaku buruk seperti minum-minuman keras, narkoba dan sebagainya. Kerjasama industri dan tokoh agama dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan bagi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan membina para pemuda melalui kegiatan keagamaan dan budaya.

Khusus untuk kegiatan budaya, geliat melestarikan budaya Melayu dapat ditemukan di Pangkalan Brandan. Nasir, ketua Sanggar Seni dan Budaya Melayu Hang Tuah, Desa Perlis, Brandan Barat, menjelaskan ada keinginan kuat masyarakat untuk melestarikan budaya Melayu, tetapi dukungan berbagai pihak untuk itu sangat minim. Nasir berkisah bahwa sanggar yang dipimpinnya giat berkesenian tetapi biaya operasionalnya harus ditanggung sendiri. "Sanggar di rumah sendiri, semuanya ditanggung sendiri. Saya berharap di desa ini ada gedung serba guna yang bisa digunakan untuk mengembangkan budaya Melayu," katanya. Nasir berharap, kehadiran pabrik SLS ikut berkontribusi bagi pengembangan kebudayaan masyarakat.

Harapan masyarakat Pangkalan Brandan untuk ikut menikmati kembali kejayaan Pertamina di masa lalu muncul kembali dengan rencana pendirian pabrik SLS di Pangkalan Brandan. Mereka menaruh harapan besar, pabrik ini akan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat Pangkalan Brandan, sekaligus memberi kontribusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dapat disimpulkan beberapa catatan yang menjadi harapan masyarakat dengan rencana pendirian pabrik SLS ini adalah :

1. Pabrik SLS memberikan kontribusi bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat Pangkalan Brandan.
2. Pabrik SLS dapat menyerap tenaga kerja lokal dari wilayah Pangkalan Brandan.
3. Pabrik SLS tidak menimbulkan persoalan

dampak lingkungan.

4. Pabrik SLS ikut aktif mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bidang pendidikan, keagamaan dan budaya.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang Diharapkan

Berdasarkan wawancara mendalam dan FGD dengan para narasumber, persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di wilayah Pangkalan Brandan dapat diidentifikasi menjadi beberapa masalah :

1. Masalah Kesejahteraan

Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera di wilayah Pangkalan Brandan, dan tingginya angka pengangguran, menjadi agenda utama masalah kesejahteraan masyarakat.

2. Masalah Infrastruktur

Terkait dengan kesejahteraan, kualitas infrastruktur seperti fasilitas air bersih, jalan penghubung, tempat tinggal yang tak layak, dan fasilitas pendidikan yang masih minim, masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam program CSR ketika pabrik didirikan

3. Masalah Pendidikan

Persoalan infrastruktur dan kualitas pendidikan ditemukan dalam realitas masyarakat Pangkalan Brandan. Di wilayah kampung nelayan, misalnya, tidak ada sekolah lanjutan (SMP dan SMA). Sekolah Dasar yang ada juga didirikan oleh masyarakat dengan kondisi yang memprihatinkan. Sebagian besar sekolah terletak di Kota Pangkalan Brandan, sehingga anak-anak kampung nelayan harus menempuh jarak yang jauh dan menyeberangi sungai untuk menjangkau sekolah.

4. Masalah Budaya

Semakin tergerusnya budaya lokal, terutama budaya Melayu, di kalangan anak muda. ada keinginan kuat mengembangkan budaya lokal Melayu untuk memperkuat identitas dan membentengi generasi muda dari pengaruh budaya asing yang semakin memprihatinkan. Hanya saja kegiatan budaya masyarakat belum optimal berjalan karena terbatasnya fasilitas.

5. Masalah Lingkungan

Dampak lingkungan dari industrialisasi di Pangkalan Brandan semakin dirasakan masyarakat berupa pencemaran, kerusakan lingkungan memerlukan kontribusi berbagai pihak untuk mengatasinya.

Untuk itu jika Pabrik SLS dibangun di Pangkalan Brandan, beberapa usulan program CSR dan Program Kemitraan-Bina Lingkungan (PKBL) yang diharapkan masyarakat adalah :

1. Program Kemitraan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Tujuannya untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kerayaktan dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi mikro di Pangkalan Brandan untuk mengembangkan usaha. Bentuknya berupa pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi lokal Pangkalan Brandan. Pemanfaatan limbah SLS untuk diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis, dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

2. Program Peduli Infrastruktur

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bentuknya berupa perbaikan atau pengadaan sarana-prasarana yang menyangkut kebutuhan utama masyarakat, seperti penyediaan sarana air bersih terutama di daerah kampung nelayan, bantuan fasilitas pendidikan, dan sebagainya.

3. Program Peduli Pendidikan

Tujuannya untuk meningkatkan akses komunitas terhadap pendidikan berkualitas. Bentuknya bisa berupa bantuan pengadaan atau perbaikan sarana pendidikan, atau program-program peningkatan kualitas SDM pendidikan dan pembelajaran.

4. Program Peduli Karakter dan Budaya

Tujuannya untuk membangun karakter dan moralitas masyarakat terutama kaum mudanya, agar semakin kokoh identitas dirinya di tengah modernitas dan gempuran budaya asing. Bentuknya berupa bantuan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan pengembangan fasilitas sanggar budaya dan seni budaya Melayu.

5. Program Peduli Lingkungan

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian alam. Bentuknya berupa bantuan pelestarian lingkungan, seperti pelestarian hutan mangrove, pelestarian biota sungai dan laut, kampanye hidup bersih kampung nelayan, dan sebagainya.

Simpulan

Pangkalan Brandan merupakan salah satu contoh kota yang pernah berjaya karena industri minyak, tetapi kemudian meredup pesonanya seiring dengan berlalunya kegiatan eksplorasi minyak. Tentu saja, masyarakat berharap industri yang pernah berjaya tersebut, dapat digerakkan kembali dengan model industri yang baru.

Dari segi sosial budaya, rencana pendirian pabrik yang dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan ekonomi masyarakat mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Secara sosial, masyarakat sekitar di Pangkalan Brandan terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu masyarakat kota, masyarakat petani, dan masyarakat nelayan. Masyarakat kota bertempat tinggal di pusat kota Pangkalan Brandan, terdiri dari pada pedagang, pegawai, buruh, dan pekerja informal. Masyarakat petani bertempat tinggal di kawasan perkebunan sawit, sedangkan masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di pulau-pulau kecil di pinggir laut lepas. Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat nelayan memiliki kesejahteraan yang relatif lebih rendah dibanding kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat yang bertempat tinggal di pusat kota Pangkalan Brandan dan masyarakat nelayan menjadi kelompok masyarakat yang akan terkena dampak langsung jika didirikan pabrik di pusat kota itu.

Dari segi struktur sosial, pengambilan keputusan dalam masyarakat dipengaruhi oleh para pemimpin dan pemuka pendapat (*opinion leader*), yang terdiri dari pemimpin formal seperti Camat, Lurah/Kepala Desa, dan jajarannya di bawahnya, hingga pemimpin non formal, seperti tokoh agama, tokoh parpol, tokoh ormas. Fenomena merebaknya kelompok

penekan (*pressure group*) dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media Lokal dengan para wartawannya, dapat ditemui di Pangkalan Brandan.

Berdasarkan wawancara mendalam dan *focus group discussion* yang melibatkan para pemimpin formal, tokoh masyarakat, dan warga di Pangkalan Brandan diperoleh tanggapan yang hampir sama, yaitu sangat setuju dengan rencana pendirian pabrik SLS. Masyarakat masih mengenang kejayaan Pertamina Pangkalan Brandan di masa lalu, dan ingin kembali menikmati kejayaan tersebut. Masyarakat berharap rencana pendirian pabrik SLS berimbas pada kehidupan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Secara khusus, mereka berharap Penduduk lokal diterima bekerja sebagai karyawan, dan tidak hanya menjadi penonton di kampung sendiri.

Selain itu, masyarakat berharap pendirian pabrik SLS tidak menimbulkan persoalan lingkungan, seperti pencemaran, kebisingan, dan lainlain. Dari sisi keamanan, wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Pangkalan Brandan, relatif aman. Tercatat angka kejahatan di tahun 2013 berjumlah 284 tindak pidana, menurun dibanding tahun 2012 sebanyak 374 tindak pidana. Jenis kejahatan yang terjadi pada triwulan terakhir tahun 2013, didominasi oleh penganiayaan dan pencurian dengan pemberatan. Demonstrasi yang melibatkan masyarakat untuk memprotes suatu kebijakan atau kondisi tertentu sangat jarang terjadi. Secara khusus, Pertamina Pangkalan Brandan, pernah didemo masyarakat terkait rencana penjualan aset.

Jika pembangunan pabrik SLS dapat direalisasikan, masyarakat berharap program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pabrik ini diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Berbagai jenis pendidikan dan pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat sangat diharapkan, misalnya bagaimana memanfaatkan limbah SLS menjadi produk yang bernilai ekonomis. Secara khusus, masyarakat nelayan berharap program CSR diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan

pra sekolah dan pendidikan dasar yang masih memerhatikan. Selain itu diperlukan penyediaan air bersih di daerah nelayan, dan program-program peningkatan kesehatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alfitri, 2011, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Argenti, Paul A, 2003, *Corporate Communication*, Boston: McGraw Hill Irwin
- Ife, Jim, Tesoriero, Frank, 2008, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Neuman, W Lawrence, 2000, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn and Bacon
- Nursahid, Fajar, 2006, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Depok: PIRAC
- Widjaja, Gunawan, Pratama, Yerimia Ardi, 2008, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kabupaten Langkat dalam Angka 2013, BPS Langkat
- Wawancara, 21 Januari 2014
- Focus Group Discussion, 21 Januari 2014 http://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Brandan